

SKRIPSI



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN PERKOTAAN
DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN
DI PROVINSI DKI JAKARTA (STUDI KASUS
KELURAHAN RAWAMANGUN DAN PULO
GEBANG)**

Disusun Oleh :

Nama	: Khansa Ramadanti Komara
NPM	: 2210011035
Jurusan	: Administrasi Publik
Program Studi	: Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2026



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN PERKOTAAN DALAM
MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI
DKI JAKARTA (STUDI KASUS KELURAHAN
RAWAMANGUN DAN PULO GEBANG)**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Terapan**

Disusun Oleh :

Nama : Khansa Ramadanti Komara

Npm : 2210011035

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara (APN)

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

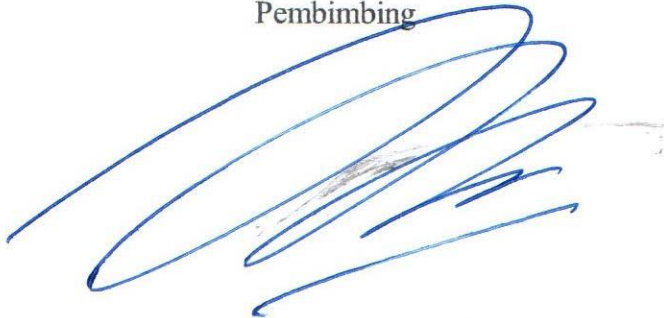
JAKARTA, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI

NAMA : Khansa Ramadanti Komara
NPM : 2210011035
JURUSAN : Administrasi Publik
PROGRAM STUDI : Administrasi Pembangunan Negara (APN)
JUDUL : Evaluasi Kebijakan Pertanian Perkotaan dalam
Meningkatkan Ketahanan Pangan di Provinsi
DKI Jakarta (Studi Kasus Kelurahan
Rawamangun dan Pulo Gebang)

Diterima dan Disetujui untuk dipertahankan
Pada 01 Juli 2026

Pembimbing



Dr. Alih Aji Nugroho, S. AP., MPA

NIP: 199205252018011002

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Diploma Empat/Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta pada 7 Agustus 2026

Ketua Merangkap Anggota



(Dr. Hidayatullah, S.Sos., MPA)

Sekretaris Merangkap Anggota

(Rindri Andewi Gati, S.AP., M.KP.)

Anggota

(Dr. Alih Aji Nugroho, S. AP., MPA)

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH
(PAKTA INTEGRITAS)**

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khansa Ramadanti Komara
NPM : 2210011035
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul “EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI DKI JAKARTA(STUDI KASUS KELURAHAN RAWAMANGUN DAN PULO GEBANG)” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penelitian Tugas Akhir ini merupakan **hasil plagiat** atau **penjiplakan** terhadap karya orang lain maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 01 Juli 2026



Khansa Ramadanti Komara
NPM : 2210011035

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, dan memberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa juga dihadiahkan untuk junjungan Nabi besar kita nabi Muhammad SAW, atas segala perjuangan dan amanah yang diberikannya yang tak pernah hilang yang selalu kita kenang. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Sarjana Terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berkontribusi membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Adapun bimbingan maupun arahan-arahan dari pihak bersangkutan, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini sampai dengan waktu yang telah ditetapkan. Disampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan penuh selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Serta kepada seluruh keluarga besar yang selalu menyemangati dan selalu mendoakan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Bapak Prof. Dr. Luki Karunia, M.A. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
3. Bapak Dr. Alih Aji Nugroho, S. AP., MPA selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini
4. Para dosen dan seluruh civitas akademika Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa studi
5. Bapak dan Ibu Petugas Kelurahan Rawamangun, Kepala Ekbang, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu pelaksanaan pra penelitian ini

6. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan, yang telah berjuang sama-sama dan telah menjadi support system dalam berbagai bentuk, mulai dari diskusi, keluhan, hingga tawa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 9 Juli 2026



Khansa Ramadanti Komara

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRAK

Pertanian perkotaan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan ketahanan pangan, pemanfaatan lahan terbatas, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pertanian perkotaan di Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Pulo Gebang, Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Evaluasi dilakukan menggunakan model CIPP Stufflebeam (1987) yang meliputi aspek *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pertanian perkotaan telah berjalan cukup baik. Pada aspek konteks, program telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan. Aspek input menunjukkan adanya dukungan dari pemerintah, penyuluh pertanian, kelompok tani, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Pada aspek proses, kegiatan dilaksanakan mulai dari budidaya hingga pemasaran hasil panen, meskipun partisipasi masyarakat masih belum optimal. Aspek produk menunjukkan bahwa program mampu meningkatkan pemanfaatan lahan, menghasilkan produk pertanian dan olahan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi kelompok tani.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan; Pertanian Perkotaan; Model CIPP; Ketahanan Pangan

ABSTRACT

Urban agriculture is one of the policies implemented by the Provincial Government of DKI Jakarta to strengthen food security, optimize the use of limited urban land, and empower local communities. This study aims to evaluate the implementation of the urban agriculture policy in Rawamangun and Pulo Gebang Subdistricts, East Jakarta Administrative City. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. The evaluation used the CIPP model developed by Stufflebeam (1987), covering the aspects of Context, Input, Process, and Product. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the implementation of the urban agriculture policy has been fairly successful. The context aspect shows that the program is aligned with community needs in supporting food security. The input aspect is supported by the government, agricultural extension officers, farmer groups, and available facilities and infrastructure. The process aspect covers activities from cultivation to product marketing, although community participation has not yet been optimal. The product aspect demonstrates that the program has improved land utilization, increased agricultural and processed products, and provided economic benefits to farmer groups.

Keywords: Policy Evaluation; Urban Agriculture; CIPP Model; Food Security.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	xiii
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori	16
B. Konsep Kunci	28
C. Kerangka Berpikir	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Metode Penelitian	33
B. Teknik Pengumpulan Data	34
C. Instrumen Penelitian	39

D. Teknik Pengolahan Data	42
E. Uji Keabsahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	46
A. Penyajian Data	46
B. Pembahasan	67
C. Sintesis Pemecahan Masalah	82
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	xiv
LAMPIRAN.....	xvii

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Produksi Urban Farming DKI JAKARTA	7
Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3. 1 Data Informan Penelitian	36
Tabel 3. 2 Perbandingan Model Evaluasi.....	42
Tabel 4. 1 Penyajian Data berdasarkan teori CIPP	66
Tabel 4. 2 pembahasan berdasarkan teori CIPP.....	80

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Pasokan Pangan DKI Jakarta.....	4
Gambar 1. 2 Grafik Luas Lahan Panen Padi DKI Jakarta.....	5
Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir	32
Gambar 4. 1 Kegiatan Panen Taman Hatinya PKK RW 03 Rawamangun.....	47
Gambar 4. 2 Dokumentasi Urban Farming Kelurahan Pulo Gebang	48
Gambar 4. 3 Produk Yang Dihasilkan Poktan Masnaga RW 03 Pulo Gebang.....	62
Gambar 4. 4 Penjualan Hasil Produk Poktan Masnaga RW03	62

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kebijakan pembangunan perkotaan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perhatian yang semakin besar terhadap isu ketahanan pangan di wilayah urban. Ketahanan pangan tidak lagi dipahami hanya sebagai persoalan produksi pangan di wilayah pedesaan, tetapi juga sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh kota-kota besar yang memiliki keterbatasan sumber daya lahan. Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang pesat menyebabkan meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat dari waktu ke waktu (Akhirul *et al.*, 2020). Kondisi ini menuntut adanya kebijakan yang mampu menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan sekaligus mengurangi ketergantungan wilayah perkotaan terhadap pasokan pangan dari daerah lain. Oleh karena itu, pemerintah mulai mengembangkan berbagai strategi yang mendorong pemanfaatan ruang perkotaan secara lebih produktif. Salah satunya melalui pengembangan pertanian perkotaan atau *urban farming* sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat (Sugihartini *et al.*, 2023). Selain berkontribusi terhadap peningkatan ketersediaan pangan lokal, kegiatan urban farming juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kemandirian pangan serta mendorong terbentuknya pola konsumsi yang lebih sehat dan berkelanjutan (Sugihartini *et al.*, 2023). Dengan demikian, pengembangan pertanian perkotaan menjadi salah satu pendekatan strategis yang tidak hanya mendukung ketahanan pangan masyarakat, tetapi juga sejalan dengan konsep pembangunan kota berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan ruang perkotaan.

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan

stabilitas sosial ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh masyarakat. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan kebijakan sebelumnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan yang menegaskan bahwa penyelenggaraan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan secara merata dan berkelanjutan. Suatu negara memiliki ketahanan pangan yang sangat penting, terutama bagi negara-negara dengan populasi yang cukup besar seperti Indonesia.

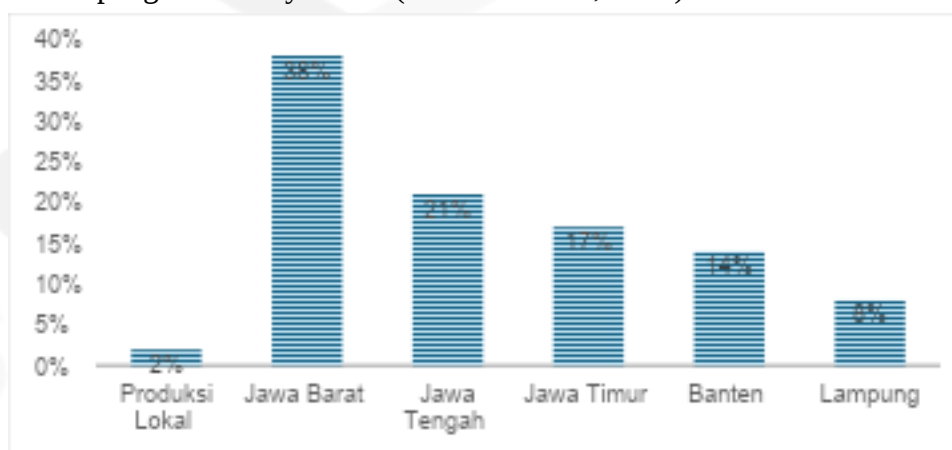
Pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 220 juta orang, dan pada tahun 2025, akan meningkat hingga sekitar 270 juta orang. Dibutuhkan kebijakan dan strategi untuk memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan karena populasi nasional terus meningkat. Ketahanan pangan menjadi isu yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena menjadi dasar bagi terciptanya stabilitas ekonomi, sosial, serta keberlanjutan pembangunan secara keseluruhan (Chaireni *et al.*, 2020). Keterbatasan lahan pertanian, tingginya tingkat konsumsi masyarakat, serta ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah menjadikan kota-kota besar rentan terhadap gangguan distribusi maupun fluktuasi harga pangan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi kebijakan yang mampu meningkatkan produksi pangan lokal meskipun dalam skala yang relatif terbatas.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan di wilayah perkotaan adalah melalui pengembangan pertanian perkotaan atau *urban farming*. Pertanian perkotaan merupakan kegiatan budidaya tanaman, peternakan, maupun perikanan yang dilakukan di kawasan perkotaan dengan memanfaatkan berbagai ruang yang tersedia seperti pekarangan rumah, lahan kosong, ruang terbuka hijau, hingga atap bangunan.

Konsep ini adalah bentuk respons terhadap keterbatasan lahan pertanian di perkotaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna serta metode budidaya yang lebih efisien. Praktik urban farming tidak hanya berfungsi sebagai sarana produksi pangan, tetapi juga diharapkan dapat mendukung konsep pembangunan kota yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam pengelolaan ruang perkotaan (Sugihartini et al., 2023). Selain itu, pertanian perkotaan juga dapat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan perekonomian masyarakat, memperbaiki kualitas ekologi kota, serta mempertahankan nilai sosial dan budaya masyarakat dalam kegiatan pertanian (Setyo & Damaijanto, 2019). Dengan memanfaatkan ruang kota secara produktif, urban farming diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan pangan sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan perkotaan.

Kebijakan pemerintah biasanya berfokus pada peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor produksi pangan dan pemberdayaan pelaku pertanian. Namun, kegiatan pertanian juga merupakan bagian dari perencanaan program yang mendukung peningkatan produksi dan ketersediaan pangan di masyarakat. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan pangan serta memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan (Wahyuni & Shaliza, 2021). Namun dalam pelaksanaannya, berbagai kebijakan di bidang pertanian masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti belum optimalnya produksi pertanian, keterbatasan sumber daya manusia di sektor pertanian, serta masih terbatasnya diversifikasi konsumsi pangan di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan memerlukan strategi yang lebih inovatif dan adaptif, termasuk melalui pemanfaatan ruang perkotaan untuk kegiatan produksi pangan yang dapat mendukung ketersediaan pangan di tingkat lokal (Nugroho *et al.*, 2025).

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus kota metropolitan terbesar di Indonesia memiliki karakteristik kependudukan yang sangat dinamis dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2024 mencapai sekitar 10,68 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk tersebut menyebabkan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah ini sangat tinggi. Namun di sisi lain, keterbatasan lahan pertanian di wilayah perkotaan membuat kemampuan produksi pangan lokal di Jakarta relatif rendah. Bahkan diperkirakan sekitar 98 persen kebutuhan pangan Jakarta masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap daerah pemasok tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh kondisi distribusi dan produksi pangan di wilayah lain (Chaerani *et al.*, 2020).



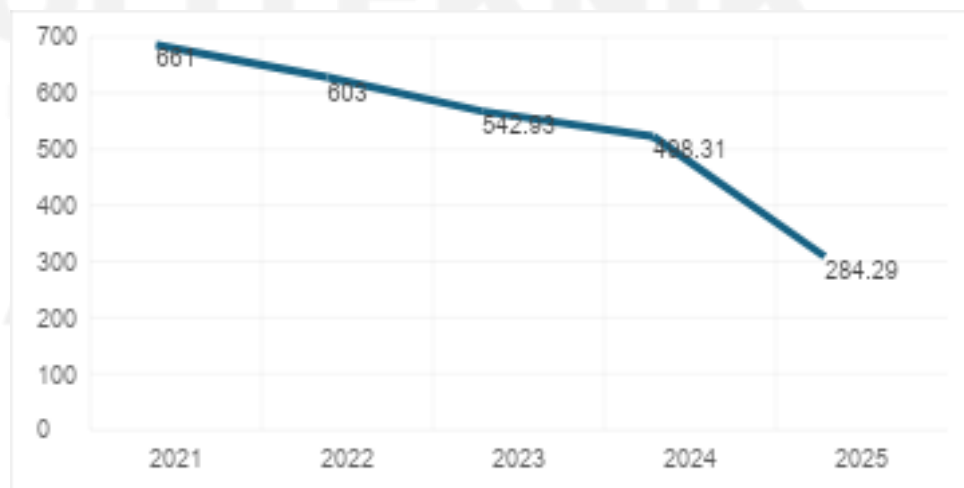
Gambar 1. 1 Grafik Pasokan Pangan DKI Jakarta

(Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, 2025)

Berdasarkan data kerja sama pasokan pangan antar daerah yang dihimpun oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta tahun 2025, sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat Jakarta masih dipasok dari wilayah lain. Daerah pemasok terbesar berasal dari Provinsi Jawa Barat, diikuti oleh Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Lampung. Sementara itu, kemampuan produksi pangan lokal di DKI Jakarta hanya mampu memenuhi

sekitar 2 persen dari total kebutuhan pangan masyarakat, sehingga menunjukkan tingginya ketergantungan kota metropolitan ini terhadap daerah pemasok di sekitarnya.

Selain ketergantungan terhadap pasokan luar daerah, keterbatasan lahan pertanian di Jakarta juga semakin diperparah oleh proses urbanisasi dan alih fungsi lahan yang terus berlangsung. Perkembangan pembangunan kota menyebabkan banyak lahan pertanian beralih fungsi menjadi kawasan permukiman, kawasan industri, maupun infrastruktur perkotaan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa luas panen padi di DKI Jakarta mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir dimana pada tahun 2023 luas panen padi tercatat sebesar 542,93 hektare, kemudian menurun menjadi 498,31 hektare pada tahun 2024, dan kembali turun menjadi sekitar 273,54 hektare pada tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan produksi pangan lokal di Jakarta semakin terbatas sehingga diperlukan inovasi kebijakan dalam memanfaatkan ruang perkotaan secara lebih produktif untuk kegiatan pertanian.



Gambar 1. 2 Grafik Luas Lahan Panen Padi DKI Jakarta

(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021-2025)

Data Badan Pusat Statistik Tahun 2025 menunjukkan bahwa luas panen padi di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021 luas panen masih mencapai sekitar 661 hektare, namun terus menurun hingga hanya sekitar 284,29 hektare pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan semakin terbatasnya lahan pertanian di wilayah perkotaan akibat proses urbanisasi dan alih fungsi lahan sehingga kemampuan produksi pangan lokal di Jakarta semakin menurun.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan kebijakan pertanian perkotaan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan ketersediaan pangan lokal sekaligus memberdayakan masyarakat perkotaan. Kebijakan ini dituangkan dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pertanian Perkotaan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mendorong pemanfaatan berbagai ruang kota seperti pekarangan rumah, lahan kosong, rumah susun, sekolah, ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), hingga kawasan pesisir untuk kegiatan budidaya pertanian, peternakan, maupun perikanan. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyusun Desain Besar Pertanian Perkotaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018–2030 sebagai arah pengembangan urban farming dalam jangka panjang. Desain besar ini memiliki beberapa target utama, antara lain peningkatan ruang terbuka hijau produktif, peningkatan produksi pertanian perkotaan, serta pengembangan produk olahan hasil pertanian perkotaan. Dalam pelaksanaannya, program urban farming di DKI Jakarta menunjukkan potensi yang cukup besar dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat. Data dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa kegiatan pertanian perkotaan mampu menghasilkan puluhan ribu ton produk hortikultura setiap tahunnya.

Tabel 1. 1 Data Produksi Urban Farming DKI JAKARTA

Tahun	Produksi Holtikultura (Ton)	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	Total Produksi (Ton)
2022	65.215	1.215	66.430
2023	80.834,64	1.326,41	82.161,05
2024	82.855,64	1.359,57	84.215,21

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, 2022-2024

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta, produksi hasil kegiatan urban farming di DKI Jakarta menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 total produksi mencapai 66.430 ton yang terdiri dari 65.215 ton hortikultura dan 1.215 ton tanaman pangan. Pada tahun 2023 produksi meningkat menjadi 82.161,05 ton, sedangkan pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 84.215,21 ton. Peningkatan produksi ini tidak terlepas dari beberapa faktor, di antaranya intensifikasi pemanfaatan lahan terbatas melalui metode hidroponik dan vertikultur, peningkatan partisipasi masyarakat dalam program urban farming, serta dukungan kebijakan pemerintah melalui pembinaan, penyediaan sarana produksi, dan pendampingan teknis dari Dinas KPKP. Selain itu, pemanfaatan ruang non-konvensional seperti atap bangunan (*rooftop*), lahan sempit, dan pekarangan rumah turut menjadi solusi atas keterbatasan lahan akibat pertumbuhan gedung dan permukiman di wilayah perkotaan.

Dominasi komoditas hortikultura seperti cabai, bayam, kangkung, tomat, dan terong menunjukkan bahwa *urban farming* di Jakarta lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan harian yang cepat panen dan adaptif terhadap lahan terbatas. Secara umum, tren peningkatan produksi ini dapat mengindikasikan adanya perkembangan positif dalam pelaksanaan program

urban farming. Namun demikian, peningkatan tersebut belum serta-merta dapat disimpulkan sebagai keberhasilan program secara menyeluruh, karena perlu dianalisis lebih lanjut dari aspek keberlanjutan, pemerataan partisipasi masyarakat, serta kontribusinya terhadap ketahanan pangan secara signifikan. Dalam konteks kebijakan, target produksi yang ditetapkan oleh Dinas KPKP (2024), seperti target tahun 2024 sebesar 84.215,21 ton, menjadi indikator capaian kinerja program. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah realisasi produksi telah sesuai dengan target yang ditetapkan serta faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian tersebut.

Meskipun memiliki potensi yang cukup besar, program pertanian perkotaan di DKI Jakarta masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan skala pelaksanaan program yang masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pangan masyarakat Jakarta yang sangat besar. Selain itu, pelaksanaan program juga sering kali menghadapi kendala dalam hal koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertanian perkotaan (Sugihartini et al., 2023).

Di beberapa wilayah, kegiatan urban farming masih belum terintegrasi secara sistematis dengan program pembangunan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pertanian perkotaan masih memerlukan evaluasi yang lebih komprehensif untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, hingga saat ini evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pertanian perkotaan di DKI Jakarta masih relatif terbatas, khususnya yang mengkaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan program tersebut di tingkat masyarakat. Padahal keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan (Wahyuni & Shaliza, 2021).

Evaluasi kebijakan menjadi penting untuk mengetahui kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan pelaksanaan program serta dampaknya terhadap peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Melalui evaluasi tersebut, dapat diidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan program sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan pemerintah yang memiliki peran penting dalam menggerakkan masyarakat melalui inovasi pangan dan program seperti urban farming (Putra *et al.*, 2025). Lebih lanjut, pelaksanaan program pertanian perkotaan di DKI Jakarta juga menunjukkan variasi yang cukup besar antar wilayah kelurahan. Perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan lahan, tingkat partisipasi masyarakat, serta dukungan pemerintah daerah dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program urban farming di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, analisis pelaksanaan kebijakan tidak hanya perlu dilakukan pada tingkat provinsi, tetapi juga perlu melihat secara lebih spesifik kondisi pelaksanaan program di tingkat kelurahan sebagai unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Teori/Konsep	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
Peran Pemerintah dalam Mengimplementasikan Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Tangerang (Putra <i>et al.</i> , 2025)	Konsep peran pemerintah dan implementasi kebijakan ketahanan pangan.	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui berbagai kebijakan dan program yang melibatkan masyarakat.	Penelitian ini membahas peran pemerintah secara umum dalam ketahanan pangan. Sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis kebijakan pertanian perkotaan berdasarkan instruksi gubernur DKI Jakarta No.14 pada kelurahan

Model Pengembangan Pertanian Perkotaan (Urban Farming) Berkelanjutan (Sugihartini, Djuliansah, & Noormansyah, 2023)	Konsep pembangunan berkelanjutan dan Pengembangan urban farming.	Metode kualitatif dengan analisis deskriptif.	Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan urban farming dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.	Penelitian ini berfokus pada model pengembangan urban farming, sedangkan penelitian ini meneliti kebijakan pertanian perkotaan dan kontribusinya terhadap ketahanan pangan masyarakat.
Evaluasi Kebijakan Program di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai (Wahyuni & Shaliza, 2021)	Konsep evaluasi kebijakan publik dalam program pertanian.	Metode kualitatif dengan pendekatan evaluatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pertanian memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala.	Penelitian ini berfokus pada evaluasi program pertanian di tingkat dinas, sedangkan penelitian ini meneliti pelaksanaan kebijakan urban farming pada tingkat kelurahan di DKI Jakarta.

Ketahanan Pangan Berkelanjutan (Chaireni et al., 2020)	Konsep ketahanan pangan berkelanjutan.	Metode studi literatur dengan analisis deskriptif.	Penelitian menunjukkan bahwa ketahanan pangan merupakan aspek penting dalam pembangunan nasional dan memerlukan dukungan kebijakan yang berkelanjutan.	Penelitian ini membahas konsep ketahanan pangan secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan pertanian perkotaan sebagai salah satu strategi untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat.
Model, Motivasi dan Kendala Masyarakat dalam Melakukan Pertanian Kota (Urban Farming) di Kota Surabaya (Setyo Parsudi & Damaijanto, 2019)	Konsep partisipasi masyarakat dan motivasi dalam kegiatan pertanian perkotaan.	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki motivasi ekonomi dan lingkungan dalam melakukan urban farming, namun terdapat kendala seperti keterbatasan lahan dan dukungan kebijakan.	Penelitian ini menyoroti motivasi dan kendala masyarakat dalam urban farming, sedangkan penelitian ini menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam program urban farming.

Sumber : Diolah peneliti

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, diketahui bahwa urban farming telah banyak dikaji sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perkotaan, terutama pada wilayah dengan keterbatasan lahan. Berbagai studi menunjukkan bahwa praktik pertanian perkotaan mampu meningkatkan ketersediaan pangan, pemanfaatan ruang terbatas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan produktif. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek pengembangan model, potensi, dan manfaat urban farming, serta belum secara

mendalam mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah dilaksanakan pada tingkat lokal dan sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar berjalan efektif di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan realitas pelaksanaan di lapangan.

Lebih lanjut, temuan dari penelitian sebelumnya juga mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan di sektor pertanian, termasuk urban farming, masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya hasil produksi, serta rendahnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan, tetapi juga oleh faktor yang melibatkan aktor, sumber daya, serta kondisi sosial masyarakat setempat. Dengan demikian, meskipun secara konseptual urban farming dinilai memiliki potensi besar, efektivitasnya dalam mendukung ketahanan pangan belum sepenuhnya dapat dipastikan tanpa adanya kajian yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan secara nyata.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena berupaya mengisi kekosongan kajian terkait pelaksanaan program urban farming pada tingkat kelurahan sebagai salah satu upaya mendukung ketahanan pangan masyarakat perkotaan. Penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan program urban farming, tetapi juga menganalisis bagaimana program tersebut dilaksanakan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, serta peran masyarakat dalam menjalankan berbagai kegiatan pertanian perkotaan. Pemilihan Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Pulo Gebang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada perbedaan karakteristik wilayah, kondisi lingkungan, dan dinamika sosial masyarakat yang memungkinkan adanya variasi dalam pelaksanaan program urban farming. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program urban farming pada tingkat lokal serta kontribusinya dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat perkotaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa urban farming merupakan salah satu strategi yang semakin penting dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah metropolitan seperti DKI Jakarta yang memiliki keterbatasan lahan pertanian. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana program urban farming dilaksanakan pada tingkat masyarakat serta mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Shaliza (2021), lebih berfokus pada evaluasi kebijakan program tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka pengentasan kemiskinan pada tingkat dinas di Kota Dumai serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki keterbaruan karena berfokus pada perbandingan pelaksanaan program urban farming pada dua kelurahan di DKI Jakarta dengan karakteristik yang berbeda, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai variasi pelaksanaan program di tingkat lokal serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan program dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbandingan pelaksanaan program urban farming pada Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Pulo Gebang serta merumuskan strategi yang dapat meningkatkan pelaksanaan program urban farming dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat di DKI Jakarta.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program *urban farming* pada Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Pulo Gebang?
2. Bagaimana strategi meningkatkan pelaksanaan program *urban farming* dalam mendukung ketahanan pangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis pelaksanaan program urban farming pada kelurahan Rawamangun dan Pulo Gebang di DKI Jakarta
2. Menganalisis strategi meningkatkan pelaksanaan program urban farming dalam mendukung ketahanan pangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik di bidang ketahanan pangan dan pengembangan pertanian perkotaan (urban farming). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi akademik mengenai pelaksanaan kebijakan pertanian perkotaan, strategi peningkatan *urban farming* di wilayah metropolitan serta menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat di wilayah perkotaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana program urban farming dijalankan di Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Pulo Gebang, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat perkotaan. Studi ini bertujuan untuk membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah kelurahan, dan lembaga terkait mengembangkan cara yang lebih efektif untuk menerapkan program urban farming di tingkat masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada

masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan lahan dan ruang perkotaan untuk kegiatan pertanian dalam upaya meningkatkan kemandirian pangan, memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih produktif dan berkelanjutan



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan pertanian perkotaan di Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Pulo Gebang menggunakan model *Context, Input, Process, Product (CIPP)*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program urban farming di Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Pulo Gebang telah berjalan cukup baik dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi CIPP, aspek process merupakan aspek yang paling baik karena pelaksanaan program telah berlangsung secara terstruktur mulai dari penyediaan bibit, budidaya, pemeliharaan, panen, hingga pemasaran hasil serta didukung oleh koordinasi yang baik antara Dinas KPKP, pemerintah kelurahan, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan kader PKK. Selain itu, aspek product menunjukkan bahwa program mampu meningkatkan pemanfaatan lahan perkotaan, menghasilkan produk pertanian dan olahan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi kelompok tani. Namun demikian, aspek input masih menjadi aspek yang perlu diperkuat karena masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana, pelatihan yang belum merata, jumlah pelaksana aktif yang terbatas, serta dukungan sumber daya yang belum optimal. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat sehingga manfaat program belum dirasakan secara luas.
2. Strategi yang perlu diprioritaskan untuk meningkatkan pelaksanaan program urban farming dalam mendukung ketahanan pangan adalah memperkuat aspek input dan meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan program. Strategi yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pertanian, pemerataan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat, penguatan kapasitas kelompok tani, optimalisasi koordinasi antar pemangku kepentingan, serta perluasan

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar keterlibatan dalam kegiatan urban farming semakin meningkat. Dengan penguatan strategi tersebut, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi ketahanan pangan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta

Perlu meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan program urban farming melalui penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai, seperti bibit unggul, pupuk, media tanam, sistem irigasi sederhana, serta peralatan budidaya lainnya. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan jumlah pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani dan masyarakat untuk mengelola urban farming.

2. Kepada Pemerintah Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Pulo Gebang

Salah satu cara untuk mendukung ketahanan pangan keluarga adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya urban farming. Selain itu, pemerintah kelurahan harus mengoptimalkan pemanfaatan lahan kosong atau aset pemerintah yang belum digunakan untuk kegiatan pertanian perkotaan. Mereka juga harus bekerja sama lebih baik dengan kelompok tani, PKK, dan penyuluh pertanian.

3. Kepada Kelompok Tani

Kelompok tani diharapkan terus meningkatkan kapasitas budidaya tanaman dan mengembangkan inovasi produk hasil pertanian yang memiliki nilai tambah ekonomi. Selain itu, kelompok tani perlu memperluas jangkauan keterlibatan masyarakat melalui kegiatan

pelatihan, panen bersama, dan demonstrasi budidaya agar minat masyarakat terhadap urban farming semakin meningkat.

4. Kepada Kader PKK dan Penyuluh Pertanian

Kader PKK dan penyuluh pertanian diharapkan lebih aktif dalam memberikan pendampingan, edukasi, dan motivasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan yang dimiliki. Pendampingan teratur dapat meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus mendorong program pertanian kota yang berkelanjutan secara lingkungan.

5. Kepada Masyarakat

Melalui pemanfaatan lahan pekarangan, mengikuti pelatihan dan sosialisasi, dan mendukung keberlanjutan program yang telah dijalankan, masyarakat diharapkan lebih terlibat dalam urban farming. Untuk meningkatkan keberhasilan program pertanian perkotaan dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah perkotaan, sangat penting bahwa masyarakat terlibat secara aktif.

6. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas program urban farming terhadap peningkatan ketahanan pangan rumah tangga dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan kebijakan pertanian perkotaan di DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Hendrayady, A., Sari, K., Wahyuni, E., Adia, V. R., dkk. (2024). *Administrasi Publik*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peters, B. G. (2019). *American Public Policy*.
- Revida, E., dkk. (2020). *Teori Administrasi Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (1987). *Systematic Evaluation*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

JURNAL

- Akhirul, A., Witra, Y., Umar, I., & Erianjoni, E. (2020). Dampak negatif pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan dan upaya mengatasinya. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, 1(3), 76–84.
- Chaireni, R., Agustanto, D., Wahyu, R. A., & Nainggolan, P. (2020). Ketahanan pangan berkelanjutan. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, 1(2), 70–79.
- Dewi, P. S., Hadi, S. N., & Ferrawati, K. (2025). Penguatan ketahanan pangan keluarga perkotaan melalui urban farming sayuran organik dan pascapanennya di Perumahan Sapphire Kelurahan Karangwangkal Banyumas Jawa Tengah. *Panrita Abdi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 9(4), 799–810.
- Hajar, S., & Kholik, K. (2021). Model mata kuliah administrasi pembangunan dalam menghasilkan kompetensi lulusan sebagai administrator andal di bidang perencanaan pembangunan. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 15(3), 429–442.
- Nugroho, A. A., Sudrajat, A., Solihati, K., & Kwon, C. A. (2025). E-government

- transformation in Central Lombok Regency: Evaluation based on the CIPP model. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 22(2), 159–171.
- Nuryadi, F. R., Santosa, P., & Koswara, D. (2025). Implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan (Studi kasus di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung). *Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Publik*, 1(5), 761–775.
- Parsudi, S. (2019). Model, motivasi dan kendala masyarakat dalam melakukan pertanian kota (*urban farming*) di Kota Surabaya. *Agridevina: Berkala Ilmiah Agribisnis*, 8(1), 34–47.
- Putra, I. P., Aziza, N. N., Putri, N. R., Kamila, T. N., & Mufidah, G. H. (2025). Peran pemerintah dalam mengimplementasikan peningkatan ketahanan pangan Kota Tangerang. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5288–5294.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi masyarakat menuju negara kesejahteraan: Memahami pentingnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388.
- Sari, D., & Prabowo, H. (2022). Peran administrasi pembangunan dalam pengelolaan program pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 55–64.
- Setiawan, F. (2019). Pengaruh teori pembangunan dunia ke-3 dalam teori modernisasi terhadap administrasi pembangunan di Indonesia. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 8(2), 1–11.
- Setyo Parsudi, & Damaijanto. (2019). Model, motivasi dan kendala masyarakat dalam melakukan pertanian kota (*urban farming*) di Kota Surabaya. *Agridevina*, 8(1).
- Sugihartini, T., Djuliansah, D., & Noormansyah, Z. (2023). Model pengembangan pertanian perkotaan (*urban farming*) berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 10(2), 1070–1089.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan efektivitas implementasi kebijakan publik.

Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 4(1), 25–36.

Wahyuni, L., & Shaliza, F. (2021). Evaluasi kebijakan program di bidang tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka pengentasan kemiskinan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai. *Jurnal Niara*, 14(2), 59–66.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pertanian Perkotaan.

DOKUMEN / LAPORAN RESMI

Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur. (2025). *Kota Administrasi Jakarta Timur Dalam Angka 2025*.

Laporan Kegiatan Poktan Masnaga RW 03 Semester I Tahun 2025.

Laporan Kegiatan Poktan 4 RW 03 Semester I Tahun 2026.